REFORMED CENTER FOR RELIGION & SOCIETY

SOCIETAS DEI | JURNAL AGAMA DAN MASYARAKAT

Vol. 13, No. 1
April 2026

p-ISSN: 2407-0556
e-ISSN: 2599-3267

EDITORIAL

Menyikapi Ambivalensi Agama

Sumanto Al Qurtuby
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Korespondensi
squrtuby@gmail.com

DOI
https://doi.org/10.33550/sd.v13i1.634

Halaman
i-iv

Abstrak

Editorial ini membahas ambivalensi agama, yakni agama sebagai sumber kekerasan sekaligus perdamaian, sebagaimana dikemukakan Appleby dan Gopin. Editorial ini juga memperluas ambiguitas tersebut ke konteks lain: agama bisa melegitimasi kekuasaan atau menjadi alat perlawanan, mendorong pemerintahan bersih atau justru korupsi karena doktrin pengampunan. Respons para sarjana beragam: dekonstruksi teks, studi kritis yang objektif, pendidikan agama kontekstual, dan reinterpretasi doktrin. Meski tak ada resep mujarab, ambivalensi ini perlu disikapi dengan cermat, bijak, dan kritis agar tidak memicu diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi.

Kata-kata kunci: ambivalensi agama, dekonstruksi teks, reinterpretasi doktrin

© **2026** Reformed Center for Religion and Society
Artikel ini di bawah ketentuan Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Lebih dari dua dekade silam, Scott Appleby, sejarawan Katolik Amerika dari University of Notre Dame di Amerika Serikat, menulis buku yang cukup menarik berjudul *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Buku ini membahas fenomena ambiguitas atau "standar ganda" agama sebagai sumber kekerasan sekaligus perdamaian. Karya provokatif ini kemudian memicu komentar dan diskusi dari banyak akademisi, peneliti sosial, pemangku kebijakan, dan tokoh agama. Pada tahun yang sama, Marc Gopin, seorang sarjana Yahudi dari George Mason University, juga menulis karya yang isinya kurang lebih sama dengan karya Appleby, berjudul *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*.

Baik Appleby maupun Gopin mencoba mencari "jalan tengah" di antara dua kecenderungan ekstrem para sarjana, aktivis, dan tokoh agama ketika memandang fenomena keagamaan. Di, satu sisi, ada yang melihat agama melulu dari sisi negatif-destruktif (misalnya, sebagai sumber kekerasan). Di sisi lain, ada pula yang memandang agama dari sisi positif-konstruktif (misalnya, sebagai sumber perdamaian). Kata "agama" yang dimaksud di sini bukan hanya dalam pengertian doktrin, ajaran, teks, simbol, tradisi, dan wacana keagamaan, tetapi juga dalam pengertian institusi, organisasi, jaringan, dan aktor keagamaan.

Saya mengamini apa yang ditulis oleh Appleby dan Gopin. Suka atau tidak suka, agama memang ambigu. Hanya saja, ambiguitas yang saya maksud dalam tulisan ini bukan hanya dalam konteks kekerasan dan perdamaian seperti yang ditulis oleh kedua sarjana terkemuka tersebut, tetapi juga dalam konteks lainnya. Ambivalensi agama tidak dapat dipungkiri: di satu sisi, agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang serba ideal dan humanistik, tetapi pada saat yang sama juga menuturkan dan melegalkan tindakan-tindakan yang eksklusif-primordialistik demi mempertahankan apa yang disebut "keyakinan".

Contoh kecil dari ambivalensi agama adalah: di satu sisi, agama dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, tetapi, di sisi lain, agama juga dapat digunakan sebagai medium perlawanan terhadap kekuasaan. Tulisan Amos Sukamto di jurnal ini menjadi salah satu contoh bagaimana agama dapat dijadikan senjata untuk melawan kekuasaan, bukan sekadar "stempel kekuasaan" belaka. Secara khusus, Sukamto membahas perjuangan umat Katolik pada era pra-kemerdekaan yang gigih membela hak-hak warga pribumi serta sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan mereka dilakukan melalui pendidikan, politik, dan perlawanan bersenjata. Tulisan Sukamto ini menepis asumsi sebagian publik Muslim di Indonesia yang menuduh umat Kristen sebagai "antek Belanda."

Ada banyak contoh di berbagai negara di dunia ini, dari Afrika Selatan dan Irlandia Utara hingga India dan Brasil, di mana para tokoh, sarjana, dan aktivis agama menggunakan agama sebagai alat untuk melawan pemerintah atau kekuasaan yang dianggap tiran, hegemonik, sektarian, dan diskriminatif. Dalam konteks Indonesia pada zaman kolonial, bukan hanya umat Katolik seperti yang ditulis oleh Sukamto, umat Islam juga banyak yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda dengan menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi perlawanan (sebut saja Pemberontakan Banten 1888, Perang Diponegoro, atau perlawanan para kiai di pesisir utara Jawa).

Namun, perlu diingat juga bahwa banyak tokoh dan umat beragama, termasuk dalam Islam, yang pro terhadap pemerintah kolonial. Banyak dari mereka yang bekerja

untuk pemerintah kolonial sebagai penasihat, pejabat pemerintah, tentara, satpam, guru, buruh, dan bahkan centeng (tukang pukul). Fenomena ambiguitas agama ini bukan hanya fenomena masa lampau (sebelum Indonesia merdeka), tetapi juga masa kini pasca-kemerdekaan.

Ambiguitas lain dari agama adalah bahwa entitas ini tidak hanya digunakan untuk menciptakan sistem dan kultur pemerintahan yang bersih (good governance), tetapi juga dapat mendorong orang melakukan tindakan buruk, seperti korupsi, suap, dan kejahatan lain yang biasa dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Tulisan Hendi dan Sugianto mengkritik para pejabat yang disumpah dengan kitab suci sesuai agama masing-masing untuk berbuat baik, bersih, dan jujur selama menjadi "abdi negara", tetapi justru larut dalam praktik korupsi yang merugikan rakyat. Kedua penulis ini kemudian mengusulkan untuk mengkaji ulang konsep jabatan dan kekuasaan dengan menjadikan gagasan sosial-keagamaan Basilius Agung (mengenai konsep oikonomia atau "jabatan sebagai penatalayanan bagi kaum miskin") dan Agustinus Hippo (mengenai konsep justitia atau "keadilan moral sebagai syarat legitimasi negara") sebagai rujukan. Kedua penulis ini menyimpulkan bahwa kerangka Basilian-Agustinian tersebut menawarkan fondasi etika kebajikan dengan menggeser fokus dari sekadar "pejabat bersih" menuju "pejabat luhur" yang berintegritas moral sehingga jika diterapkan, fondasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem dan kultur pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.

Meskipun banyak yang tidak setuju, tidak bisa dipungkiri bahwa agama, dalam batas tertentu, dapat mendorong orang untuk berulang kali melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Diktum agama memang mengajarkan hukuman (bagi pelaku kejahatan), tetapi di pihak lain, agama juga mengajarkan "permaafan" dan "pengampunan." Banyak ajaran agama yang mengatakan bahwa jika umat beragama melakukan doa, amalan, dan ibadah ini-itu, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Ajaran-ajaran seperti ini dapat mendorong umat beragama untuk berulang kali melakukan kejahatan karena asumsi mereka bahwa setelah melakukan kejahatan, mereka akan mendapat pengampunan dari Tuhan karena Dia adalah Sang Maha Pemaaf.

Lalu, bagaimana menyikapi ambivalensi agama ini? Para sarjana telah lama berdebat mengenai hal ini dengan menggunakan metode analisis dan pendekatan yang berbeda-beda, seperti hermeneutika, sosio-historis, kritik teks, dan lain-lain. Ada yang berpura-pura tidak tahu-menahu tentang ambiguitas tersebut, ada yang bersikap apologetik, dan ada pula yang sangat kritis terhadap tradisi dan ajaran agama mereka.

Salah satu contoh ketika menyikapi ambivalensi agama adalah melakukan dekonstruksi terhadap teks-teks keagamaan. Kelompok ini berargumen bahwa sebelum teks-teks keagamaan tersebut didekonstruksi, transformasi teologis yang lebih egaliter dan manusiawi tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan umat beragama. Mereka juga beralasan bahwa kesulitan mengikis gerakan militan agama, antara lain, karena kelompok ini selalu menjustifikasi tindakan kejahatan mereka dengan "kitab suci". Jadi, dekonstruksi diperlukan sebagai prasyarat transformasi.

Sarjana lain seperti Yohanes Hasiholan Tampubolon dan Dody Truna dalam jurnal ini melihat pentingnya mengembangkan studi kritis keagamaan yang objektif. Menggunakan pendekatan realisme kritis Roy Bhaskar, kedua penulis tersebut menyatakan bahwa "kritik terhadap agama tidak bersifat moralistik, melainkan

merupakan bagian dari objektivitas ilmiah." Studi agama, menurut mereka, "dapat bersifat kritis sekaligus objektif tanpa terjerumus ke dalam aktivisme maupun klaim netralitas semu." Dengan kata lain, para sarjana agama tidak perlu ragu dan was-was dalam melakukan kritik agama, selama hal itu dilakukan dengan semangat akademis yang bertanggung jawab.

Ada pula para aktor agama (termasuk pemerintah) yang menyikapi ambivalensi agama dengan mengembangkan model pendidikan agama sesuai dengan konteks masyarakat tempat mereka berada. Misalnya, artikel Jonathan Midkiff membahas dua model pendidikan agama yang berbeda di Indonesia dan Inggris. Jika di Inggris pendidikan agama menekankan pemikiran dan refleksi kritis terhadap teks, ajaran normatif, dan tradisi keagamaan, di Indonesia lebih menekankan harmoni sosial, kewargaan yang bertanggung jawab, serta pentingnya hidup rukun dalam masyarakat plural yang penuh persamaan dan perbedaan. Meskipun penekanannya berbeda, pendidikan agama di kedua negara ini bertujuan untuk menciptakan "toleransi kognitif" yang sangat diperlukan dalam kehidupan beragama.

Sikap lain para aktor agama adalah mengkaji ulang doktrin atau tradisi keagamaan tertentu agar tetap relevan dan tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Artikel Dhimas Anugrah menarik untuk dijadikan contoh. Ia membahas bagaimana komunitas Kristen di Indonesia dapat tetap bertahan hidup dan berbuat baik, meskipun hidup di tengah kepungan masyarakat yang tidak ramah dan tidak menyambut *"wong liyan"* (orang asing). Untuk menjawab permasalahan ini, ia menggunakan pendekatan teologi praktis-konstruktif dengan menjadikan studi kasus umat Kristen di Indonesia yang mengalami peristiwa kurang menyenangkan (misalnya sikap permusuhan dari kelompok agama lain) sebagai bahan dialog dengan tradisi teologi hospitalitas dan kesaksian biblika yang bertumpu pada konsep "*guesthood*" dalam tradisi Kristen.

Memang tidak mudah menyikapi fenomena ambivalensi agama dan tidak ada "resep mujarab" untuk menyelesaikan persoalan ambiguitas ini. Meski begitu, watak ambivalensi agama ini harus disikapi dengan cermat, bijak, respek, dan kritis agar umat beragama yang majemuk ini dapat hidup berdampingan secara harmonis dan damai dalam perbedaan. Jika tidak, ambivalensi agama ini dapat menjadi senjata ampuh untuk memicu berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti perundungan, diskriminasi, kekerasan, korupsi, intoleransi, persekusi, dan lain-lain, yang marak terjadi di Indonesia.